

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Guntur Hamzah, 2016, *Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Masshuri Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit PolGov.

Mochtar Naim, 2013, *Meratau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhaimin, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Rinaldy Bima, dkk, 2023, *Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Dalam Pengujian Aturan Hukum di Indonesia*, Takalar: Pakalawaki.

Muhammad Yasin, Et. Al., 2015, *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).

Naeni Amanulloh, 2015, *Demokratisasi Desa*, Kementrian Desa, Jakarta: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Rahyunir Rauf dan Sri maulidiah, 2015, *Pemerintahan Desa*, Pekanbaru: Zanaf Publishing.

Rudy, 2022, *Hukum Pemerintahan Desa*, Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Soimin dan Mashurianto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Syafrida Hafni, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Mengadakan Perubahan Dalam

STBD: 1907 No. 212 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan

dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

C. Skripsi

Muhammad Arifin Ilyas, 2017, Pencalonan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Siti Rahmawati, 2021, Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa Pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO.128/PUU-XIII/2015, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo.

D. Jurnal

Ach. Rubaie, dkk., 2014, Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 1 Maret 2014.

Ahmad Fawaid dan Abd. Rahman, 2022, "Sejarah Perkembangan Pengadilan di Indonesia", Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo, Vol. 3, No. 1, Mei 2022.

Ardiansyah Arbie, Toar Neman Palilingan dan Harly Syanly Muaja, 2023, Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes, Universitas Sam Ratulangi.

Husni L Larunga, dkk, 2022, Syarat Domisili Pada Pencalonan Kepala Desa Dan Pengangkatan Perangkat Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, Jurnal: Yustiabel, Vol. 6 Nomor 1, 2022.

Fence M. Wantu, dkk., 2021, Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No.2, Juni 2021.

Rusdi Muchtar, 2014, Praktek Komunikasi Antar Budaya Para Perantau Minangkabau di Jakarta, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 18 No.3 Oktober 2014: 251-259.

Sugiono Margi dan Maulida Khazanah, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara*, Jurnal, Rechten: Riset hukum dan Hak Asasi Manusia, Surabaya, Vol. 1, No. 3, 2019.

E. Internet

<https://fh.unpatti.ac.id/kajian-yuridis-terhadap-kedudukan-desa-dalam-negara-kesatuan-republik-indonesia/>.

<https://www.mkri.id/peradilan/sejarah-dan-perkembangan>.

https://pemasdes.kapuashulukab.go.id/?page_id=399.

<https://massofa.wordpress.com/2008/04/03/pemerintahan-desa/>.

<https://www.liputan7.id/daerah/2121064955/oknum-kades-digerebek-emakemak-lantaran-berduaan-dengan-wanita-bukan-mukhrim>

<https://rri.co.id/daerah/764591/tungku-tigo-sajaringan-pilar-kepemimpinan-dalam-masyarakat-minangkabau>.